

# **PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP KINERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA PT SEMEN BATURAJA TBK PALEMBANG**

**Susi Ardiani  
Evada Dewata  
Sandrayati  
Meilinda Mila Afsari**

Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang, Indonesia

## **ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan prinsip *Good Corporate Governance* terhadap kinerja pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Data pada penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode wawancara dan *survey* dengan bantuan instrumen penelitian berupa kuesioner yang berjumlah 34 lembar yang disebarlang langsung pada seluruh karyawan yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa di PT Semen Baturaja (Persero) Tbk termasuk User (Sekretaris Perusahaan Bidang GCG). Data pada penelitian ini dianalisis dengan menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan software SPSS versi 20.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial penerapan GCG tidak berpengaruh terhadap kinerja pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*E-procurement*), sedangkan secara simultan penerapan GCG berpengaruh terhadap kinerja pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*E-procurement*).

**Kata Kunci** : Prinsip-prinsip GCG, Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik, BUMN

## **ABSTRACT**

*The purpose of this study is to determine the effect of GCG implementation to the procurement of goods and services performance electronically. The data of this research were collected by using interview and survey method. The total of this questionnaire are 34 sheets that spread to all staff in procurement of goods and services department in Semen Baturaja Inc including User (the GCG secretary). The data of this research analyzed by multiple linear regression analysis using Windows SPSS version 20.0. The result of this research indicated that GCG implementation did not have positive and significant effect to the procurement of goods and services performance electronically (E-Procurement), whereas GCG implementation have positive and significant effect to the procurement of goods and services performance electronically (E-Procurement) simultaneously.*

**Keywords**: GCG Principles, E-Procurement Performance and Services, State-Owned Enterprise

## I PENDAHULUAN

Pada awalnya tujuan dibentuknya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah untuk penjabaran dan implementasi pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi “bumi dan air kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Perlu kita ketahui bahwa tidak semua BUMN memiliki kualitas kinerja yang baik, tergantung dengan penerapan tata kelola yang ada dalam BUMN tersebut. Kita sering mendengar banyak perusahaan yang terpuruk karena tata pemerintahan sebuah perusahaan tersebut tidak sesuai sehingga banyak *fraud* yang terjadi. Rendahnya kinerja BUMN berkaitan dengan belum efektifnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik di BUMN.

*Good Corporate Governance* adalah struktur dan mekanisme yang mengatur pengelolaan perusahaan sehingga menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun pemangku kepentingan. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dapat berkontribusi dalam peningkatan kinerja perusahaan. Tata kelola yang baik selalu dicita-citakan menjadi semakin terbuka, terhindar dari benturan kepentingan, mempunyai akuntabilitas tinggi, bertanggung jawab serta bertambah wajar dengan menegakkan prinsip *fairness*.

Konsep *Good Corporate Governance* memiliki tujuan untuk dapat mengembangkan dan meningkatkan nilai perusahaan, mengelola sumber daya dan resiko secara lebih efektif dan efisien, meningkatkan disiplin dan tanggung jawab dari organisasi perusahaan demi menjaga kepentingan para *shareholder* dan *stakeholder* perusahaan, meningkatkan kontribusi perusahaan (khususnya perusahaan-perusahaan pemerintah) terhadap perekonomian nasional, meningkatkan investasi nasional, serta untuk mensukseskan program privatisasi perusahaan-perusahaan pemerintah.

Dalam *Viva news.com* baru-baru ini diberitakan *Indonesian Institute for Corporate Directorship* (IICD) mengumumkan 30 perusahaan terbuka yang memiliki skor terbaik dalam penerapan GCG. Ada 14 perusahaan plat merah yang termasuk dalam penerapan

*Good Corporate Governance* terbaik. Anggota pembina IICD menyatakan bahwa penilaian mengacu pada *Association of South East Asia Nations (ASEAN) Corporate Governance Scorecard* yang sudah mulai diterapkan untuk perusahaan-perusahaan terbuka dikawasan ASEAN menjelang Integrasi pada 2015. Penilaian ini dilakukan kepada 97 perusahaan terbuka yang terdaftar sebagai emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI). Ada 225 pertanyaan menjadi acuan IICD dalam melakukan penilaian. Pertanyaan disesuaikan dengan akses informasi yang dimiliki oleh perusahaan seperti keterbukaan emiten, hasil RUPS, website resmi dan dari sumber-sumber lainnya, beda dengan melakukan survei ke perusahaan, melakukan *interview* perusahaannya harus sukarela dinilai sedangkan ini tidak perlu meminta izin kepada perusahaan yang bersangkutan, karena menggunakan informasi publik, maka semua bisa dinilai.

Dengan adanya penilaian GCG terbaik tersebut menggerakkan beberapa perusahaan besar terutama perusahaan yang belum masuk dalam kategori terbaik untuk lebih memperhatikan penerapan GCG pada perusahaannya. Seperti halnya PT Semen Baturaja (Persero) Tbk (PTSB) yang berbentuk perseroan sebagai organisasi usaha demi mengejar profit pasti sangat memperhatikan efisiensi dan efektivitas sehingga dibutuhkan GCG dalam perseroan.

Prinsip-prinsip GCG yang harus diterapkan oleh PTSB selaku BUMN dalam kegiatannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik/GCG Pada BUMN, yaitu terdiri atas transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran. Peraturan tersebut menekankan kewajiban bagi BUMN untuk menerapkan GCG secara konsisten dan/atau menjadikan prinsip-prinsip GCG sebagai landasan operasionalnya, yang pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, dan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.

Kegiatan PTSB ialah melayani transaksi jual beli yang tidak lepas dari proses pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa menduduki posisi yang sangat penting dalam suatu organisasi, karena merupakan sarana penggunaan anggaran dalam jumlah signifikan guna mendapatkan barang, jasa dan pekerjaan yang dibutuhkan bagi pelaksanaan misi organisasi, maka dari itu pengadaan barang dan jasa sangatlah dibutuhkan dalam penyediaan infrastruktur yang dilakukan oleh PT Semen Baturaja (Persero) Tbk. Pengadaan barang dan jasa tidak lepas dari peraturan yang telah ditetapkan pemerintah dan peraturan direksi serta ketersediaan anggaran. Anggaran merupakan hal penting dalam pengadaan barang dan jasa dikarenakan anggaran ini yang juga menentukan jenis dari pengadaan barang dan jasa nantinya.

Saat ini PTSB telah menerapkan sistem pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik/aplikasi (*E-Procurement*). Jasa Pemerintah No 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan secara Elektronik. Pengadaan secara elektronik atau *E-Procurement* adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah unit kerja yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.

Selain sebagai implementasi dari prinsip-prinsip GCG, aplikasi *E-Procurement* ini juga bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kinerja pengadaan barang dan jasa secara umum dan khususnya Departemen Logistik. *E-Procurement* dirancang sebagai alat bantu PTSB dalam mengelola pengadaan barang dan jasa secara elektronik sesuai dengan *Standard Operational Procedure (SOP)* Pengadaan yang berlaku. Proses yang sudah menggunakan metode *E-Procurement* dimulai dari permintaan pengadaan (OR), Surat Permintaan Penawaran Harga (SPPH), lelang, *eAuction*, negosiasi, serta kontrak. *E-Procurement* PTSB menggunakan metode pengelolaan rantai suplai (*Supply Chain Management*) yang tidak hanya mengelola pengadaan saja, tetapi juga proses permintaan pengadaan, pengelolaan kontrak, pengelolaan data rekanan, *monitoring* penyelesaian

pekerjaan, pengelolaan *asset/inventori* serta *monitoring* pembayaran tagihan. Masalah pada penelitian ini adalah apakah penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* secara parsial dan simultan berpengaruh terhadap kinerja pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*E-procurement*) pada PTSB?

## II TELAAH LITERATUR

### Pengertian *Good Corporate Governance*

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No: PER-01 /MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN (tanggal 1 Agustus 2011), definisi *Good Corporate Governance* adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.

### Tujuan dan Manfaat *Good Corporate Governance*

Penerapan *Good Corporate Governance* dilingkungan BUMN dan BUMD mempunyai tujuan sesuai KEPMEN BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2001 pada pasal 4, yaitu :

- a. Memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional.
- b. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, transparan dan efisiensi, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ.
- c. Mendorong agar organ dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap stakeholders maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN.
- d. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional.
- e. Meningkatkan iklim investasi nasional.
- f. Mensukseskan program privatisasi.

### Pengertian Kinerja Perusahaan

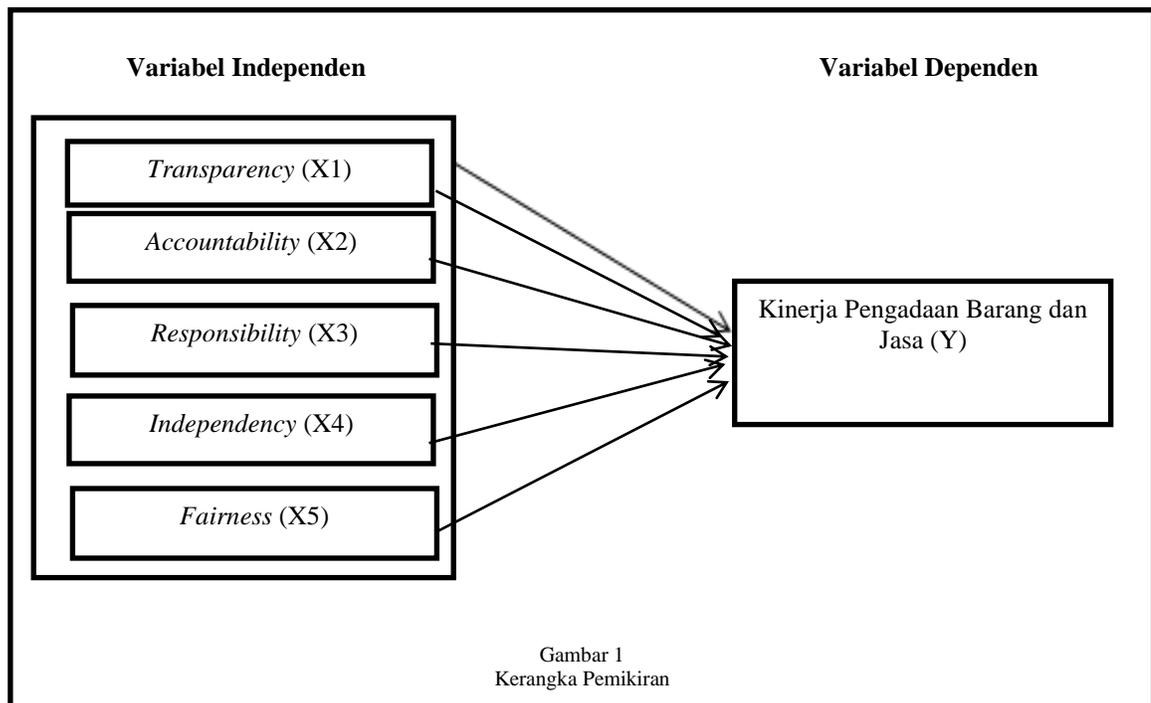
Sedarmayanti (2011:11) mengungkapkan bahwa Kinerja merupakan terjemahan dari performance yang berarti Hasil kerja seorang pekerja, sebuah proses manajemen atau suatu organisasi secara keseluruhan, dimana hasil kerjanya tersebut harus dapat ditunjukkan buktinya secara konkrit dan dapat diukur (dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan).

### Pengadaan Barang dan Jasa melalui E-Procurement

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah. Pengertian pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang

prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa. Pengadaan memiliki aplikasi berupa elektronik yang disebut dengan *E-Procurement*. *E-procurement* menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Manzoor (2009:16) yang dimaksud dengan *E-Procurement* yakni "These are standalone corporate procurement system. Typically implemented over an intranet, these system are used to distribute the purchasing function to end users. These system contain information about supplies and electronic catalogs from pre-approved vendors. these system also provide automatic authorizations and approvals to purchasing activities performed by end users."

### Kerangka Pemikiran



Gambar 1  
Kerangka Pemikiran

### III METODE PENELITIAN

#### Variabel Penelitian

1. *Good Corporate Governance*  
*Good Corporate Governance* adalah struktur dan mekanisme yang mengatur pengelolaan perusahaan atau lembaga pemerintah sehingga menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun pemangku kepentingan.
2. Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik
  - Kinerja adalah hasil kerja seorang pekerja, sebuah proses manajemen atau suatu organisasi secara keseluruhan, dimana hasil kerja tersebut harus dapat ditunjukkan buktinya secara konkrit dan dapat diukur (dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan).”
  - Pengadaan secara *E-Procurement* adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang undangan. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah unit kerjayang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.

#### Instrument Penelitian

Instrumen yang digunakan berupa kuesioner yang diukur menggunakan *Skala Likert*. Menurut Sugiyono (2016:93) *Skala Likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial

Tabel 1  
Skor Instrumen Penelitian

Jawaban atas Pernyataan	Skor
Sangat Tidak Setuju	1
Tidak Setuju	2
Netral	3
Setuju	4
Sangat Setuju	5

(Sumber: Sugiyono, 2016)

#### Populasi dan Sempel

Menurut Sugiyono (2016:80) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa di PT SB termasuk *User* (Sekretaris Perusahaan Bidang GCG). Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2016:81). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah responden sebanyak 34 orang yaitu pegawai yang menyangkut bidang pengadaan dan GCG.

### IV HASIL PENELITIAN

#### Uji t (secara parsial)

Pengujian secara parsial (Uji t) terhadap masing-masing variabel independen: Transparansi (X1), Akuntabilitas (X2), Responsibilitas (X3), Independensi (X4), dan *Fairness* (X5) dilakukan untuk menguji diterima atau ditolaknya hipotesis yang telah diajukan. Hasil *output* regresi dengan SPSS akan menunjukkan nilai t hitung dan signifikansinya.

Tabel 2  
Signifikansi Nilai t

Model	Unstandardized Coefficients		T	Sig.
	B	Std. Error		
(Constant)	21,525	6,331	3,400	,002
x1	-,252	,397	-,636	,530
x2	,548	,510	1,074	,292
x3	,349	,418	,836	,410
x4	,550	,448	1,228	,230
x5	,121	,463	,261	,796

Sumber: Output SPSS diolah (2017)

Dari tabel 2 maka dapat dilihat nilai t-hitung dan derajat signifikansi tiap variabel independen yang merupakan indikator penerimaan dan penolakan hipotesis. Hasil pengujian hipotesis melalui uji parsial (Uji t) secara terperinci dijelaskan sebagai berikut :

- a) Pada variabel transparansi (X1) nilai t-hitung sebesar -0,636 lebih kecil dari nilai t-tabel -2,048, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel independen transparansi (X1) tidak memiliki pengaruh atau kontribusi terhadap variabel dependen kinerja pengadaan barang dan jasa (Y). Dari nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,530 maka dapat dinyatakan bahwa transparansi (X1) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pengadaan barang dan jasa sebesar 53%. Berdasarkan hasil tersebut, maka hipotesis peneliti bahwa transparansi memengaruhi kinerja (Ha1) ditolak.
- b) Pada variabel akuntabilitas (X2) nilai t-hitung sebesar 1,074 lebih kecil dari nilai t-tabel 2,048, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel independen akuntabilitas (X2) tidak memiliki pengaruh atau kontribusi terhadap variabel dependen kinerja pengadaan barang dan jasa (Y). Dari nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,292 maka dapat dinyatakan bahwa akuntabilitas (X2) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pengadaan barang dan jasa sebesar 29,2%. Berdasarkan hasil tersebut, maka hipotesis peneliti bahwa akuntabilitas memengaruhi kinerja (Ha2) ditolak.
- c) Pada variabel responsibilitas (X3) nilai t-hitung sebesar 0,836 lebih kecil dari nilai t-tabel 2,048, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel independen responsibilitas (X3) tidak memiliki pengaruh atau kontribusi terhadap variabel dependen kinerja pengadaan barang dan jasa (Y). Dari nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,410 maka dapat dinyatakan bahwa responsibilitas (X3) tidak memiliki

pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pengadaan barang dan jasa sebesar 41%. Berdasarkan hasil tersebut, maka hipotesis peneliti bahwa responsibilitas memengaruhi kinerja (Ha3) ditolak.

- d) Pada variabel independensi (X4) nilai t-hitung sebesar 1,228 lebih kecil dari nilai t-tabel 2,048, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel independen independensi (X4) tidak memiliki pengaruh atau kontribusi terhadap variabel dependen kinerja pengadaan barang dan jasa (Y). Dari nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,230 maka dapat dinyatakan bahwa independensi (X4) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pengadaan barang dan jasa sebesar 23%. Berdasarkan hasil tersebut, maka hipotesis peneliti bahwa independensi memengaruhi kinerja (Ha4) ditolak.
- e) Pada variabel *fairness* (X5) nilai t-hitung sebesar 0,261 lebih kecil dari nilai t-tabel 2,048, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel independen *fairness* (X5) tidak memiliki pengaruh atau kontribusi terhadap variabel dependen kinerja pengadaan barang dan jasa (Y). Dari nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,796 maka dapat dinyatakan bahwa *fairness* (X5) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pengadaan barang dan jasa sebesar 79,6%. Berdasarkan hasil tersebut, maka hipotesis peneliti bahwa *fairness* memengaruhi kinerja (Ha5) ditolak.

**Uji F (secara simultan)**

Pengujian simultan (Uji F) dilakukan untuk menguji pengaruh variabel independen secara bersama-sama (simultan). Uji F atau ANOVA dilakukan dengan membandingkan tingkat signifikansi yang ditetapkan untuk penelitian dengan *probability value* dari hasil penelitian.

**Tabel 3**  
**Signifikansi Nilai F**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	242,165	5	48,433	3,014	,027 <sup>b</sup>
	Residual	449,953	28	16,070		
	Total	692,118	33			

a. Dependent Variable: y

b. Predictors: (Constant), x5, x1, x4, x3, x2

Sumber: Output SPSS diolah (2017)

Dari tabel 3, nilai F-hitung adalah sebesar 3,014 dan signifikansi sebesar 0,027. Hal tersebut mengindikasikan bahwa F-hitung sebesar 3,014 lebih besar dari F-tabel 2,558, sehingga dapat dinyatakan bahwa secara simultan variabel independen Transparansi (X1), Akuntabilitas (X2), Responsibilitas (X3), Independensi (X4), dan *Fairness* (X5) secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa (Y).

Tingkat signifikansi sebesar 0,027 kurang dari 0,05 atau 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan variabel independen Transparansi (X1), Akuntabilitas (X2), Responsibilitas (X3), Independensi (X4), dan *Fairness* (X5) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa sebesar 2,7%. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka hipotesis peneliti bahwa Transparansi (X1), Akuntabilitas (X2), Responsibilitas (X3), Independensi (X4), dan *Fairness* (X5) mempengaruhi Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa (Ha6) dapat diterima.

## V PEMBAHASAN

### **Pengaruh Transparansi terhadap Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa**

Nilai koefisien regresi variabel transparansi (X1) bernilai negatif yaitu -0,252. Hal ini menunjukkan bahwa setiap penurunan transparansi sebesar satu satuan (1), maka tingkat kinerja pengadaan juga akan menurun sebesar 0,252 dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap.

Pada variabel, nilai t-hitung sebesar -0,636 lebih kecil dari nilai t-tabel -2,048, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel

independen transparansi (X1) tidak memiliki pengaruh atau kontribusi terhadap variabel dependen kinerja pengadaan barang dan jasa (Y) atau dengan kata lain, hipotesis peneliti (Ha1) bahwa transparansi berpengaruh terhadap kinerja pengadaan barang dan jasa ditolak. Banyak faktor yang mempengaruhi variabel transparansi tidak berpengaruh terhadap kinerja pengadaan. Salah satunya dalam situs resmi BPKP mengenai *exitmeeting assessment* penerapan GCG PT Semen Baturaja, pada situs ini menyatakan bahwa aspek pengungkapan informasi (transparansi) memiliki skor terendah. Secara umum yang menjadi penyebab rendahnya aspek tersebut adalah belum tersedianya tata kelola informasi yang memuat sistem dan prosedur/mechanisme yang harus dilakukan terkait dengan keterbukaan (transparansi) informasi kepada publik, serta kekhawatiran pihak Semen Baturaja apabila publikasi laporan tahunan di media massa atau website digunakan pihak lain untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu (<file:///D:/HTTP/transparansi%20dan%20independensi%20Situs%20Resmi%20BPKP%202017.htm>). Hal ini juga sama seperti hasil pengisian kuesioner oleh beberapa karyawan bagian pengadaan barang dan jasa serta sekretaris perusahaan dibidang GCG, setelah dirangkum ada beberapa orang yang menyatakan bahwa upaya mengembangkan manajemen resiko dalam sistem *e-procurement* dan upaya mempublikasikan informasi pengadaan secara *e-procurement* dan informasi terkait yang materil ada yang berada pada angka 2 yaitu Buruk. Data rekapitulasi jawaban responden variabel transparansi, sebagai berikut:

**Tabel 4**  
**Rekapitulasi Jawaban Responden Variabel Transparansi**

No	Pernyataan	Sangat Buruk	Buruk	Cukup Baik	Baik	Sangat Baik
		1	2	3	4	5
1	Upaya mengembangkansistem Pengadaan secara e-procurementberdasarkan peraturan yang berlaku.			4	22	8
2	Upaya mengembangkanteknologi informasimanajemen Pengadaan secara e-procurement.			7	20	7
3	Upaya mengembangkan manajemenresiko dalam sistem e-procurement.		1	9	18	6
4	Upaya mempublikasikan informasi Pengadaan secara e-procurement dan informasi terkait yang material.		1	12	12	9
Jumlah (136)		0	2	32	72	30
Persentase % (100%)		0%	1,47%	23,52%	52,94%	22,05%

Sumber: data primer diolah

Dalam Perpres RI No. 54 tahun 2010 prinsip pengadaan dan tata kelola perusahaan yang baik yang diterapkan salah satunya ialah prinsip transparansi. Prinsip ini yang sangat menentukan terwujudnya prinsip lain seperti akuntabilitas. Dengan rendahnya prinsip transparansi yang didapat maka tidak menutup kemungkinan jika prinsip yang lain juga rendah.

Variabel yang diambil peneliti merupakan prinsip-prinsip GCG, dimana prinsip-prinsip tersebut saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan, pengaruh transparansi terhadap kinerja pengadaan barang dan jasa tidak berpengaruh bila hanya satu faktor (parsial), ini sesuai dengan hasil yang didapatkan peneliti. Hal ini juga telah sesuai dengan hasil penelitian Robinson (2014) yang menyatakan bahwa variabel transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan.

#### **Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa**

Nilai koefisien regresi variabel akuntabilitas (X2) bernilai positif yaitu 0,548. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi akuntabilitas sebesar satu satuan maka tingkat kinerja pengadaan juga akan meningkat sebesar 0,548 dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap. Pada variabel ini, nilai t-hitung sebesar 1,074 lebih kecil dari nilai t-tabel 2,048, sehingga dapat dikatakan

bahwa variabel independen akuntabilitas (X2) tidak memiliki pengaruh atau kontribusi terhadap variabel dependen kinerja pengadaan barang dan jasa (Y), atau dengan kata lain, hipotesis peneliti (Ha2) bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pengadaan barang dan jasa ditolak.

Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 Tentang Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pengertian akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik, jadi tidak menuntut kemungkinan bahwa sebuah lembaga pemerintah mengalami kegagalan dalam menjalankan visi dan misi perusahaan. Dari hasil yang didapat, ada beberapa orang yang menyatakan bahwa ke empat point pernyataan mengenai akuntabilitas bernilai Buruk. Upaya membentuk komite audit, upaya membentuk dan menetapkan kembali peran dan fungsi auditor internal terkait pengadaan barang dan jasa, serta upaya menggunakan auditor eksternal yang berkualitas dan independen masih terbilang kurang baik. Tabel 5 menunjukkan data rekapitulasi jawaban responden variabel akuntabilitas, sebagai berikut:

**Tabel 5**  
**Rekapitulasi Jawaban Responden Variabel Akuntabilitas**

No	Pernyataan	Sangat Buruk	Buruk	Cukup Baik	Baik	Sangat Baik
		1	2	3	4	5
1	Upaya membentuk komite audit.		1	10	18	5
2	Upaya membentuk dan menetapkan kembali perandafungsi auditor internal terkait pengadaan barang dan jasa.		1	8	20	5
3	Upaya menetapkan sistem penilaian kerja pengadaan terkait pengadaan barang dan jasa.		1	13	15	5
4	Upaya menggunakan auditor eksternal yang berkualitas dan independen.		1	9	17	7
Jumlah (136)		0	4	40	70	22
Persentase % (100%)		0%	2,94%	29,41%	51,4%	16,17%

Sumber: data primer diolah

Faktor yang mungkin mempengaruhi hal tersebut bisa saja karena proses yang masih dijalankan PT Semen Baturaja, dalam menerapkan GCG membutuhkan waktu yang terbilang lama untuk mencapai tata kelola perusahaan yang baik. Variabel yang diambil peneliti merupakan prinsip-prinsip GCG, dimana prinsip-prinsip tersebut saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan, pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja pengadaan barang dan jasa tidak berpengaruh bila hanya satu faktor (parsial), ini sesuai dengan hasil yang didapatkan peneliti. Hal ini juga telah sesuai dengan hasil penelitian Robinson (2014) yang menyatakan bahwa variabel transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan.

#### **Pengaruh Responsibilitas terhadap Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa**

Nilai koefisien regresi variabel responsibilitas (X3) bernilai positif yaitu 0,349. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi responsibilitas sebesar satu satuan maka tingkat kinerja pengadaan juga akan meningkat sebesar 0,349 dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap. Pada variabel ini, nilai t-hitung sebesar 0,836 lebih kecil dari nilai t-tabel 2,048, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel independen responsibilitas (X3) tidak memiliki pengaruh atau kontribusi terhadap variabel dependen kinerja pengadaan barang dan jasa (Y).

Menurut pasal 3 Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011,

Pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Responsibilitas yang rendah menyatakan bahwa belum terlaksananya pengelolaan perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip korporasi yang benar. Dari hasil yang didapat, telah sesuai dengan hasil pengisian kuesioner oleh beberapa karyawan bagian pengadaan barang dan jasa serta sekretaris perusahaan dibidang GCG, setelah dirangkum ada beberapa orang yang menyatakan bahwa ke empat point pernyataan mengenai responsibilitas bernilai Buruk. Upaya mempertimbangkan tanggung jawab sosial, upaya menghindari penyalahgunaan kekuasaan, upaya menjadi professional dan mematuhi etika, serta upaya menjadikan lingkungan bisnis yang baik masih terbilang kurang baik. Data rekapitulasi jawaban responden variabel responsibilitas, sebagai berikut:

**Tabel 6**  
**Rekapitulasi Jawaban Responden Variabel Responsibilitas**

No	Pernyataan	Sangat Buruk	Buruk	Cukup Baik	Baik	Sangat Baik
		1	2	3	4	5
1	Upaya mempertimbangkan tanggung jawab		1	6	24	3
2	Upaya menghindari penyalahgunaan Kekuasaan.		1	8	18	7
3	Upaya menjadi profesional dan mematuhi etika.		1	8	17	8
4	Upaya menjadikan lingkungan bisnis yang baik.		1	6	22	5
Jumlah (136)			4	28	81	23
Persentase % (100%)			2,94%	20,58%	59,55%	16,91%

Sumber: data primer diolah

Faktor yang mungkin mempengaruhi hal tersebut bisa saja karena proses yang masih dijalankan PT Semen Baturaja, dalam menerapkan GCG membutuhkan waktu yang terbilang lama untuk mencapai tata kelola perusahaan yang baik. Variabel yang diambil peneliti merupakan prinsip-prinsip GCG, prinsip-prinsip tersebut saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan, pengaruh responsibilitas terhadap kinerja pengadaan barang dan jasa tidak berpengaruh bila hanya satu faktor (parsial), ini sesuai dengan hasil yang didapatkan peneliti. Hal ini juga telah sesuai dengan hasil penelitian Robinson (2014) yang menyatakan bahwa variabel transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan.

#### **Pengaruh Independensi terhadap Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa**

Nilai koefisien regresi variabel independency (X4) bernilai positif yaitu 0,550. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi independensi sebesar satu satuan maka tingkat kinerja pengadaan juga akan meningkat sebesar 0,550 dengan asumsi variabel

independen lain nilainya tetap. Pada variabel ini, nilai t-hitung sebesar 1,228 lebih kecil dari nilai t-tabel 2,048, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel independen independensi (X4) tidak memiliki pengaruh atau kontribusi terhadap variabel dependen kinerja pengadaan barang dan jasa (Y).

Menurut pasal 3 Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Kemandirian (*independency*) yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Variabel independensi yang didapat masih dalam kategori kurang baik, dari hasil yang didapat, bisa dibandingkan dengan dengan hasil pengisian kuesioner oleh beberapa karyawan bagian pengadaan barang dan jasa serta sekretaris perusahaan dibidang GCG, setelah dirangkum dari keempat pernyataan mengenai independensi, beberapa responden memberi nilai tiga (3) yaitu Cukup Baik. Data rekapitulasi jawaban responden variabel independensi, sebagai berikut:

**Tabel 7**  
**Rekapitulasi Jawaban Responden Variabel Independensi**

No	Pernyataan	Sangat Buruk	Buruk	Cukup Baik	Baik	Sangat Baik
		1	2	3	4	5
1	Upaya membentuk panitia pengadaan yang kompeten.			8	23	3
2	Upaya untuk tidak melibatkan pengaruh pihak luar yang tidak sesuai dengan prinsip korporasi yang sehat.			10	19	5
3	Upaya menghindarkan benturan kepentingan.			10	19	5
4	Upaya menjalankan aktivitas Pengadaan secara e-procurement dengan baik dan dinamis.			4	24	6
Jumlah (136)				32	85	19
Persentase (100%)				23,52%	62,5%	13,97%

Sumber: data primer diolah

Hal ini menunjukkan penerapan prinsip GCG dalam bidang independensi tidak terlalu berpengaruh terhadap kinerja pengadaan barang & jasa. Variabel yang diambil peneliti merupakan prinsip-prinsip GCG, dimana prinsip-prinsip tersebut saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan, pengaruh independen terhadap kinerja pengadaan barang dan jasa tidak berpengaruh bila hanya satu faktor (parsial), ini sesuai dengan hasil yang didapatkan peneliti. Hal ini juga telah sesuai dengan hasil penelitian Robinson (2014) yang menyatakan bahwa variabel transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan.

**Pengaruh *Fairness* (kewajaran) terhadap Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa**

Nilai koefisien regresi variabel *fairness* (X5) bernilai positif yaitu 0,121. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kewajaran sebesar satu satuan maka tingkat kinerja pengadaan juga akan meningkat

sebesar 0,121 dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap. Pada variabel ini, nilai t-hitung sebesar 0,261 lebih kecil dari nilai t-tabel 2,048, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel independen *fairness* (X5) tidak memiliki pengaruh atau kontribusi terhadap variabel dependen kinerja pengadaan barang dan jasa (Y).

Menurut pasal 3 Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011, Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari hasil yang didapat, bisa dibandingkan dengan hasil pengisian kuesioner oleh beberapa karyawan bagian pengadaan barang dan jasa serta sekretaris perusahaan dibidang GCG, setelah dirangkum dari keempat pernyataan mengenai *fairness*, beberapa responden memberi nilai tiga (3) yaitu Cukup Baik. Data rekapitulasi jawaban responden variabel *fairness*, sebagai berikut:

**Tabel 8**  
**Rekapitulasi Jawaban Responden Variabel *Fairness***

No	Pernyataan	Sangat Buruk	Buruk	Cukup Baik	Baik	Sangat Baik
		1	2	3	4	5
1	Upaya menetapkan prosedur standar operasional Pengadaan secara e-procurement.			7	22	4
2	Upaya menetapkan kebijakan Pengadaan secara e-procurement untuk melindungi kesalahan yang berasal dari dalam.			11	17	6
3	Menetapkan peran dan tanggung jawab komisarisan dan manajemen dalam Pengadaan secara e-procurement.			12	18	4
4	Upaya pengungkapan secara wajar sistem informasi Pengadaan secara e-procurement melalui sistem informasi berbasis web.			9	22	4
Jumlah (136)				39	79	18
Persentase % (100%)				28,67%	58,08%	13,23%

Sumber: data primer diolah

Hal ini menunjukkan penerapan prinsip GCG dalam bidang *fairness* tidak terlalu berpengaruh terhadap kinerja pengadaan barang & jasa. Variabel yang diambil peneliti merupakan prinsip-prinsip GCG, prinsip-prinsip tersebut saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan, pengaruh independen terhadap kinerja pengadaan barang dan jasa tidak berpengaruh bila hanya satu faktor (parsial), ini sesuai dengan hasil yang didapatkan peneliti.

Hal ini juga telah sesuai dengan hasil penelitian Robinson (2014) yang menyatakan bahwa variabel transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan.

**Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan *Fairness* (kewajaran) terhadap Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa**

Berdasarkan hasil pengujian simultan (Uji F), nilai F-hitung adalah sebesar 3,014 dan signifikansi sebesar 0,027. Hal tersebut mengindikasikan bahwa F-hitung sebesar 3,014 lebih besar dari F-tabel 2,558, sehingga dapat dinyatakan bahwa secara simultan variabel independen Transparansi (X1), Akuntabilitas (X2), Responsibilitas (X3), Independensi (X4), dan *Fairness* (X5) secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa (Y).

Tingkat signifikansi sebesar 0,027 kurang dari 0,05 atau 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan variabel independen Transparansi (X1), Akuntabilitas (X2), Responsibilitas (X3), Independensi (X4), dan *Fairness* (X5) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa sebesar 2,7%.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* memiliki pengaruh terhadap kinerja pengadaan barang dan jasa jika prinsip-prinsip GCG dilaksanakan secara simultan atau bersama-sama. Hal ini juga didukung oleh Surat Keputusan Menteri Negara BUMN no Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002. Dalam Surat Keputusan Menteri Negara BUMN tersebut ditetapkan lima prinsip GCG sebagai aturan dasar (norma kepatuhan) yang harus ditaati dalam pengelolaan perusahaan dan pelaporannya. Prinsip-prinsip GCG tersebut harus secara keseluruhan di laksanakan pada PT SB, karena jika hanya salah satu prinsip yang dilaksanakan maka hasilnya tidak akan maksimal atau tidak berpengaruh dikarenakan kelima prinsip tersebut saling berkaitan dan berhubungan satu sama lain untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik.

Hal ini berbeda dengan hasil penelitian Robinson (2014) yang menyatakan

bahwa variabel X secara simultan tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Adapun yang menyebabkan Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada penelitian Robinson memiliki pengaruh yang lemah terhadap kinerja karyawan karena PTPN III (Persero) sendiri lebih meningkatkan kinerja perusahaan bukan kinerja karyawan.

## VI SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan *Good Corporate Governance* terhadap kinerja pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*) pada PT Semen Baturaja (Persero) Tbk Palembang. Berdasarkan hasil analisis data sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara parsial menunjukkan bahwa variabel transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa pada PT Semen Baturaja (Persero) Tbk Palembang. (Y).
2. Akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa pada PT Semen Baturaja (Persero) Tbk Palembang.
3. Responsibilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa pada PT Semen Baturaja (Persero) Tbk Palembang.
4. Independensi tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa (Y) pada PT Semen Baturaja (Persero) Tbk Palembang.
5. *Fairness* tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa (Y) pada PT Semen Baturaja (Persero) Tbk Palembang.
6. secara simultan (Uji-F), menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa pada dengan nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) diperoleh nilai sebesar 35% sedangkan sisanya 65% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi. 2011. *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika
- Andira, Ayu. 2012. Analisis implementasi prinsip-prinsip *good corporate governance* (gcg) dan hubungannya terhadap kinerja pt. United tractors Tbk. Cabang makassar. *Skripsi*. Universitas Hasanuddin. Makassar
- Amir, Manzoor. 2009. *Inovasi Pendidikan Melalui Problem Based Learning*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Effendi, Muh. Arief. 2009. *The Power Of Corporate Governance: Teori dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI). 2001. *Seri Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance): Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan)*. Jilid 1, Edisi 3. Jakarta
- Hery. (2010). *Potret Profesi Audit Internal (di Perusahaan Swasta dan BUMN Terkemuka)*. Bandung: Alfabeta.
- Kementerian BUMN. 2002. Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-117/MMBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang penerapan prinsip GCG
- Kementerian BUMN. 2011. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara
- Keputusan Direksi PT Semen Baturaja (Persero) Tbk Nomor : PH. 01. 04/ 180/ 2013 Tentang Perubahan atas Surat Keputusan Direksi PT Semen Baturaja (Persero) Nomor : PH. 01. 04/ 034 /2012 Tentang Buku Pedoman *Good Corporate Governance* (GCG) PT Semen Baturaja (Persero)
- KNKG. 2009. *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*
- Lukviarman, Niki. 2016. *Corporate Governance*. Solo: Penerbit PT Era Adicitra Intermedia

- LKPP ( Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah). 2010. *Modul Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Jakarta : Penerbit Smesco
- Mamanggi, Arilla Ratya dkk. 2014. Pengaruh pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* Kinerja karyawan PT.PLN Jember. *Skripsi*. Universitas Jember (UNEJ). Jember (<http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/63078>, diakses 25 januari 2017)
- Mardiasmo (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Novatiani, R. Ait dan Fatimmah, Jeanny. 2012. Pengaruh penerapan *good corporate governance* terhadap keandalan laporan keuangan (Survei Pada Tiga Perusahaan BUMN Di Bidang Jasa di Bandung). *Skripsi*. Universitas Widyatama. Bandung (<http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/2227>, diunduh 23 januari 2017)
- Silalahi, Ulbert. 2007. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga
- Sedarmayanti. 2011. *Tata Kerja dan Produktivitas Kerja : Suatu Tinjauan Dari Aspek Ergonomi Atau Kaitan Antara Manusia Dengan Lingkungan Kerjanya* (Cetakan Ketiga). Bandung: Mandar Maju
- Ristifani. 2009. Analisis Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Dan Hubungannya Terhadap Kinerja PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. *Skripsi*. Universitas Gunadarma. Jakarta
- Sembiring, Robinson. 2012. Pengaruh penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* (gcg) terhadap kinerja karyawan( studi pada pt. Perkebunan nusantara iii (persero) medan). *Skripsi*. Universitas Sumatera Utara. Sumatera Utara
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung. Penerbit Alfabeta
- Tika, P. 2008. *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No.54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Presiden Republik Indonesia. 2012. Peraturan Presiden No.70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Priyatno, Duwi. 2012. *Cara Kilat Belajar Analisis Data dengan SPSS 20*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Viva News. 2013. Ada 14 BUMN Raih skor Corporate Governance Terbaik. (<http://www.viva.co.id/bea-cukai/read/400217-ada-14-bumn-raih-skor-corporate-governance-terbaik>, diakses 22 Januari 2017)